

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Faundez, Julio (Editor), 1993, *Good Government and Law: Legal and Institutional Reform in Developing Countries*, MacMillan Press, England.
- Hadjon, Philipus M., dkk., 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Cetakan Kesembilan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hadjon, Phiplipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dan Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Edisi Pertama*, Yayasan Tifa, Jakarta.
- Komisi Informasi Provinsi DIY, 2015, *Keterbukaan Informasi Publik Regulasi dan Tanya Jawab*, Penerbit Komisi Informasi DIY, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ketujuh*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Kedelapan*, Liberty, Yogyakarta.
- Mihradi, R. Muhammad, 2011, *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nurjaya, I Ketut Karmi, “Peranan KPPU dalam Menegakkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No, 1 Januari 2009.
- Rais, H. Syaukani H., 2003, *Akses dan Indikator tata kelola pemerintahan daerah yang baik*, Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah, Yogyakarta.
- Simanjuntak, Enrico, 2013, *Sengketa Informasi Publik di Peradilan tata Usaha Negara*, Makalah dalam Kegiatan Bintek Penegakan PERDA Kota Serang bagi Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS), Bandung.

- Sugeng, Bambang dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi Edisi Pertama*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta.
- Ujang Abdullah, 2014, *Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Sengketa Keterbukaan Informasi Publik*, PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG RI, Jakarta.
- Wairocana, I Gusti Ngurah, 2005, *“Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Implementasinya di Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Bali”*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
- Widodo, Joko, 2001, *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya.
- Zulkarnain, Sirajuddin, dan Aan Eko Widiarto, 2006, *Menggagas Keterbukaan Informasi Publik: Upaya Kolektif Berantas Korupsi*, Malang Corruption Watch (MCW) dan YAPPIKA, Malang.

## **B. Peraturan Perundangan-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3344).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4380).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5079).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4846).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 tentang Tata  
Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik beserta Lampirannya.

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian  
Sengketa Informasi Publik (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia  
No.5).

### **C. Putusan Pengadilan dan Berita Acara Persidangan**

Berita Acara Persidangan Perkara Nomor 004/V/KIPDIY-PS/2015.

Berita Acara Persidangan Perkara Nomor 003/I/KIDIY-PS/2016

Putusan Perkara Nomor 004/V/KIPDIY-PS/2015.

Putusan Perkara Nomor 003/I/KIDIY-PS/2016.

### **D. Internet**

[http://www.komisiinformasi.go.id/news/view/menanti-eksekusi-putusan-  
sengketa-informasi](http://www.komisiinformasi.go.id/news/view/menanti-eksekusi-putusan-sengketa-informasi), diakses pada tanggal 23 Februari 2016 Pukul 13.35  
WIB.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10548> di  
akses pada tanggal 23 Februari 2016 pukul 13.13 WIB